

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis

Data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan melalui pembagian kuesioner, wawancara dan observasi dengan narasumber guna mendapatkan keterangan secara langsung. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu menentukan responden dengan disengaja dari responden karena kualitas yang dimiliki responden. Peneliti memutuskan apa yang perlu diketahui dan ditetapkan untuk menemukan orang-orang yang dapat dan bersedia memberikan informasi berdasarkan pengetahuan atau pengalaman. Jika jumlah yang telah ditentukan dirasa cukup dalam penelitian, tidak diwajibkan untuk menambah sampel lagi. Penulis menentukan 50 responden dengan jenis responden yaitu ibu rumah tangga, guru, pedagang, PNS, dan petani. Dengan masing-masing pengambilan sampel yaitu 10 setiap jenis respondennya.

Dari lima jenis responden yaitu ibu rumah tangga, guru, pedagang, PNS, dan petani dirasa sudah dapat mewakili *citizenship* masyarakat Kota Mataram dari segi pekerjaannya. Dengan jumlah 10 responden disetiap jenisnya sudah cukup mempengaruhi penelitian ini dalam mengetahui *citizenship* masyarakat Kota Mataram.

1. Citizenship

a) Citizen

Seperti yang sudah dijelaskan yang dimaksud *citizenship* dalam hal pemilihan Kepala Daerah adalah sekumpulan hak dan kewajiban seorang individu sebagai bagian dari komunitas politik, wujud dari hak dan kewajiban itu sendiri meliputi hak memiliki kebebasan, hak untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses politik dan yang terakhir hak untuk mendapatkan kesejahteraan dalam segala aspek kehidupan disuatu komunitas politik sesuai dengan standar masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sudah diatur oleh hukum, namun yang terjadi di lapangan dalam pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di Kota Mataram masyarakat yang menggunakan hak dan kewajibannya tidak begitu memahami akan hak dan kewajiban itu sendiri. Masyarakat Kota Mataram merasa senang dengan adanya pelaksanaan Pilkada karena acara pilkada seperti hari berkumpul dan berangkat bersama ke TPS untuk memilih calon pemimpin (wawancara, november 2017). Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pendapat Masyarakat tentang kebebasan memilih siapa yang menjadi Pemimpin Daerah dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	27	54%
2.	Setuju	21	42%
3.	Biasa saja	1	2%
4.	Kurang setuju	1	2%
5.	Tidak setuju sama sekali	0	0
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.1 tersebut di atas menunjukkan bahwa 54 % responden menyatakan sangat setuju bahwa dalam memilih Pemimpin Daerah mereka benar-benar harus bebas memilih pemimpin dalam pilkada serentak tahun 2015. Masyarakat Kota Mataram menyadari bahwa mereka memiliki hak penuh untuk bisa memilih pemimpin yang mereka sukai sesuai hati nurani. Sebagian masyarakat bahkan paham bahwa kita sebagai warga negara yang hidup di negara demokrasi memiliki hak konstitusional yang memiliki kebebasan terutama dalam memilih pemimpin daerahnya sesuai keinginan masing-masing, dan hak tersebut sudah dijamin oleh Undang-Undang jadi masyarakat tidak perlu merasa tertekan dalam memilih pemimpin daerahnya (wawancara, november 2017).

Selain hak dalam memilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu, setiap warga negara juga memiliki hak untuk mencalonkan dirinya sebagai kandidat calon pemimpin daerah di Pilkada serentak. Seperti yang tertera pada pasal 7 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 yaitu “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pendapat Masyarakat mengenai masyarakat memiliki hak untuk menjadi calon Pemimpin Daerah dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	10	20%
2.	Setuju	35	70%
3.	Biasa saja	2	4%
4.	Kurang setuju	2	4%
5.	Tidak setuju sama sekali	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.2 di atas menunjukkan bahwa 70% responden masyarakat menyatakan setuju bahwa mereka juga memiliki kesempatan untuk menjadi calon pemimpin tak menutup kemungkinan untuk siapapun. Dari hasil wawancara sebagian responden mengatakan bahwa

mereka setuju karena mereka mempunyai hak untuk menjadi calon pemimpin asalkan sesuai dengan kompetensi diri dan memenuhi prosedur yang berlaku.

Dari tabel di atas ada 2% reponden yang menyatakan bahwa mereka tidak setuju sama sekali dengan hak untuk siapa pun bisa menjadi calon pemimpin daerah, karena mereka menganggap bahwa jika masyarakat belum tentu bisa menjadi pemimpin yang baik dan ketakutan masyarakat tersebut bertambah dengan adanya pemberitaan yang terjadi di daerah luar pulau Lombok dengan adanya tukang parkir menjadi calon pemimpin daerah. Masyarakat tersebut menganggap bahwa seorang calon Pemimpin daerah harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam bidang perpolitikan agar bisa membawa daerah tersebut ke arah yang lebih baik (wawancara, november 2017).

Kemudian dalam kewajiban sebagai warga negara, warga negara dituntun untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam hal ini untuk hadir dan ikut serta dalam Pilkada sebagai tanggung jawab masyarakat suatu negara. Dari hasil penelitian penulis mendapat data sebagai berikut :

Tabel 3.3
Pendapat Masyarakat tentang kewajiban sebagai warga negara Indonesia untuk hadir dan ikut serta dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	22	44%
2.	Setuju	24	48%
3.	Biasa saja	4	8%
4.	Kurang setuju	0	0
5.	Tidak setuju sama sekali	0	0
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.3 tersebut di atas menunjukkan bahwa 48% responden menyatakan setuju. Dari 48% responden yang setuju bisa di perkirakan bahwa mereka ikut hadir dan memeriahkan pesta demokrasi yang ada di Kota Mataram dalam pemilihan Pemimpin daerah di Kota Mataram tahun 2015. Mereka merasa bahwa sebagai masyarakat perlu ikut mengawasi dan mengawal jalannya pilkada agar tidak terjadi yang tidak diinginkan. Masyarakat tersebut sadar akan suara mereka bisa menentukan pemimpin daerah mana yang dapat menjadikan Kota Mataram lebih baik, akan merasa rugi jika suara mereka tidak digunakan

dan hasil pemilihan Pemimpin Daerah yang terpilih tidak sesuai akan merugikan daerah itu sendiri.

Dari hasil data pada tabel 3.3 di atas dapat di lihat bahwa tidak ada responden yang menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan pernyataan bahwa kewajiban sebagai warga negara Indonesia salah satunya yaitu hadir dan ikut serta dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu, tetapi hasil dari wawancara dengan salah satu narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan bahwa percuma hadir dan ikut serta dalam pemilihan Pemimpin Daerah tahun 2015 lalu karena merasa suara yang diberikan dirasa tidak mempengaruhi siapa yang menjadi pemimpin daerah tersebut. Seperti yang sudah dialaminya bahwa ada calon pemimpin yang menjadi kandidat dalam Pilkada tahun 2015 membayar KPUD untuk membeli suara agar calon tersebut bisa terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu (wawancara, november 2017).

Selain kewajiban untuk hadir dan ikut serta dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu, kewajiban sebagai warga negara juga yaitu dengan mengontrol dan mengawasi pemimpin daerah yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pendapat Masyarakat tentang kewajiban mengontrol dan mengawasi pemimpin yang terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	22	44%
2.	Setuju	21	42%
3.	Biasa saja	5	10%
4.	Kurang setuju	2	4%
5.	Tidak setuju sama sekali	0	0
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.4 tersebut di atas menunjukkan bahwa 44% responden menyatakan sangat setuju dengan kewajiban sebagai warga negara untuk mengontrol dan mengawasi pemimpin yang sudah terpilih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu di Kota Mataram. Dari 44% responden yang menyatakan sangat setuju karena mereka merasa ikut bertanggungjawab atas pilihan mereka walaupun ada juga responden yang mengatakan bahwa calon yang di pilih tidak terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu tetapi mereka merasa jika bukan masyarakat daerah itu sendiri

yang mengawasi dan mengontrol pemimpin daerahnya siapa lagi yang akan mengontrol dan mengawasi.

Dari tabel di atas ada 4% responden yang menyatakan kurang setuju dengan kewajiban sebagai warga negara untuk mengawasi dan mengontrol pemimpin daerah yang telah terpilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu. Pernyataan tersebut didukung dengan komentar yang diberikan yang mengatakan bahwa di Indonesia sudah ada lembaga yang berwenang untuk mengawasi dan mengontrol Pemimpin Daerah yang terpilih dalam pelaksanaan kerjanya selama satu periode.

b) Client

Client adalah warga negara yang dikendalikan oleh kondisi dimana warga negara tersebut melakukan sesuatu untuk mendapatkan upah. Client selalu muncul di setiap kegiatan perpolitikan di pemilihan umum maupun di pemerintahan dan juga dilingkungan kita sehari hari. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut :

Tabel 3.5

Pendapat masyarakat tentang menerima sejumlah uang menjelang hari pemungutan suara mempengaruhi hak pilih masyarakat tersebut dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	2	4%
2.	Setuju	1	2%
3.	Biasa saja	4	8%
4.	Kurang setuju	11	22%

5.	Tidak setuju sama sekali	32	64%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.5 tersebut di atas menunjukkan bahwa ada 64% responden yang menyatakan tidak setuju sama sekali dengan menerima sejumlah uang menjelang hari pemungutan suara mempengaruhi hak pilih dalam Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram. Masyarakat Kota Mataram yang menyatakan tidak setuju sama sekali dengan hal tersebut beragumen bahwa perbuatan membayar suara masyarakat untuk memilih calon yang memberikan atau yang biasa disebut *money politic* bukan memberikan kesejahteraan bagi daerah mereka, yang terjadi bahkan sebaliknya yaitu korupsi yang akan merugikan masyarakat itu sendiri. Tidak dipungkiri bahwa masyarakat Kota Mataram dari hasil wawancara mengatakan bahwa membeli suara rakyat di setiap pemilihan umum sudah menjadi rahasia umum yang sudah menjadi kebiasaan, bahkan sekalipun orang yang berpendidikan tinggi dalam berbagai aspek bisa saja menerima uang tersebut agar memilih calon kandidat yang memberikan uang tersebut (wawancara, november 2017).

Masyarakat Kota Mataram yang menyatakan tidak setuju sama sekali dengan adanya penyuapan setiap menjelang diadakannya pemilihan umum merasa bahwa mereka tidak setuju sama sekali karena hal ini akan menjadi kebiasaan yang akan merusak generasi dimasa depan bahwa politik itu kotor. Tetapi disisi lain masyarakat tersebut juga

merasa bahwa uang yang diberikan oleh calon kandidat kepada masyarakat bernilai bagi untuk menambah uang belanja mereka dan berpikir bahwa uang yang mereka terima lumayan mempengaruhi kehidupan mereka hanya karena satu suara yang menurutnya satu suara tidak jujur mungkin tidak akan terlalu berpengaruh bagi pilkada serentak tahun 2015. Hal ini dikatakan oleh masyarakat tersebut karena merasakannya langsung saat Pilkada serentak tahun 2015 lalu.

Dari tabel di atas ada sekitar 4% responden yang menyatakan sangat setuju dengan memberikan uang menjelang pemungutan suara karena menganggap bahwa hanya untuk 1 suara saja mereka bisa menerima uang sekitar Rp 20.000-Rp 100.000, hal itu membuat masyarakat menjadi lupa akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik (wawancara, november 2017). Namun bagaimana dengan masyarakat yang sudah diberikan uang dapat memilih calon lain yang tidak memberikan uang pada saat pemungutan suara pilkada serentak tahun 2015 ? dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.6

Pendapat Masyarakat tentang masyarakat yang sudah diberikan uang saat menjelang pemungutan suara berani memilih calon lain yang tidak memberikan uang pada Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Berani	16	32%
2.	Tidak tahu	26	52%

3.	Tidak berani	8	16%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.6 di atas dapat dilihat bahwa ada 52% responden menyatakan tidak tahu dengan ketika sudah diberikan uang menjelang pemungutan suara berani untuk memilih calon lain. Hal tersebut karena mereka merasa jika mereka menyatakan berani berarti dirinya telah ingkar janji dan itu menjadi resiko dalam menerima sejumlah uang dari calon yang memberikan uang untuk memilihnya. Pengakuan lainnya yaitu jika menyatakan tidak berani berarti merasa dirinya telah melakukan politik kotor yang menguntungkan calon pemimpin yang memberikan uang dan merusak perpolitikan di masa depan (wawancara, november 2017).

Dari 52% responden yang menyatakan tidak tahu tersebut ada juga yang mengaku bahwa pada saat pemilihan kemaren tidak menerima sejumlah uang dan tidak pernah mengalami hal seperti itu. Namun ada sekitar 32% responden yang menyatakan berani jika sudah menerima uang tetapi memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nuraninya. Masyarakat tersebut juga sadar bahwa hal ini harus di lakukan agar tidak terbiasa menerima uang dari calon pemimpin yang menyuap suara rakyat untuk memilih calon tersebut pada pemilihan umum selanjutnya.

Sama halnya dengan memberikan uang kepada masyarakat menjelang pemungutan suara pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu di Kota Mataram, pemberian fasilitas ke pada masyarakat entah itu fasilitas Individu maupun fasilitas umum merupakan *money politik*. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.7

Pendapat masyarakat tentang memilih calon yang menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	1	2%
2.	Setuju	16	32%
3.	Biasa saja	24	48%
4.	Kurang setuju	7	14%
5.	Tidak setuju sama sekali	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.7 tersebut di atas menunjukkan bahwa 48% responden menyatakan biasa saja dengan masyarakat memilih calon yang menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram. Pernyataan tersebut didukung oleh beberapa keterangan yang menyampaikan bahwa dijanjikan sebuah fasilitas itu merupakan hal yang biasa, dan sudah menjadi kebiasaan dalam politik di pilkada serentak, mereka mengaku pernah menerima pada pilkada serentak tahun 2015 kebutuhan dapur seperti minyak goreng, beras, dan lain-lain dari calon pemimpin yang sedang berkunjung ke daerah tempat tinggal. Ketika calon pemimpin tersebut menjanjikan atau tidaknya fasilitas untuk masyarakat, masyarakat akan tetap biasa saja, karena berfikir bahwa semua yang di janjikan oleh calon pemimpin tidak begitu berpengaruh besar untuk kehidupan sehari-hari warga tersebut (wawancara, november 2017).

Dari tabel 3.7 di atas ada 32% responden yang menyatakan setuju dengan masyarakat memilih calon pemimpin yang menjanjikan fasilitas individu/umum dengan syarat janji kampanye calon tersebut dapat terealisasi dengan baik jika terpilih dalam pilkada serentak. Masyarakat yang setuju pun merasa bahwa sah-sah saja jika mereka menerima fasilitas yang di berikan oleh calon pemimpin kepada masyarakat karena menganggap bahwa tidak ada ruginya bagi masyarakat tersebut untuk menerima fasilitas tersebut hanya untuk memilih calon tersebut.

Dari tabel di atas juga dapat dilihat ada sekitar 7% responden yang menyatakan kurang setuju dengan masyarakat memilih calon pemimpin yang menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015. Masyarakat tersebut merasa hal itu merupakan hal yang tidak benar karena masyarakat tidak setuju dengan calon yang memberikan fasilitas dengan syarat harus menerima calon tersebut.

Berarti dari data tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat tidak begitu berpengaruh dengan ada atau tidaknya fasilitas yang di berikan oleh calon pemimpin kepada masyarakat tersebut. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.8
Pendapat masyarakat tentang memilih calon lain yang tidak menjanjikan fasilitas individu/umum dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	2	4%
2.	Setuju	15	30%

3.	Biasa saja	17	34%
4.	Kurang setuju	13	26%
5.	Tidak setuju sama sekali	3	6%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.8 di atas menunjukkan ada 34% responden menyatakan biasa saja dengan masyarakat memilih calon yang tidak menjanjikan fasilitas apapun dalam pilkada serentak tahun 2015 lalu di Kota Mataram. Keterangan yang diberikan pun sama dengan hasil data pada tabel 3.7, masyarakat merasa biasa saja dengan ada atau tidaknya janji dari calon pemimpin.

30% responden dari tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa mereka setuju dengan memilih calon pemimpin yang tidak menjanjikan apapun dirasa merupakan pemimpin yang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan kinerjanya lebih membuahkan hasil dari pada calon pemimpin yang memiliki banyak janji kepada masyarakat. Pemimpin yang baik tidak menjanjikan sesuatu kepada masyarakat karena bukan janji yang masyarakat inginkan tetapi kerja nyata, jujur dan adil (wawancara, november 2017).

Namun ada 26% responden dari tabel 3.8 di atas menyatakan kurang setuju karena menurut masyarakat tersebut, pemimpin yang tidak berani janji adalah pemimpin yang tidak memiliki visi-misi yang jelas

dan masyarakat merasa calon pemimpin yang tidak memiliki janji-janji dirasa tidak sepenuh hati untuk membangun daerah Kota Mataram.

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

a) Pengaruh Tokoh

Tokoh calon pemimpin dalam pilkada merupakan salah satu pengaruh yang besar dengan keterlibatan masyarakat dalam pilkada. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pendapat masyarakat tentang etika tokoh yang menjadi calon mempengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	2	4%
2.	Setuju	17	34%
3.	Biasa saja	23	46%
4.	Kurang setuju	4	8%
5.	Tidak setuju sama sekali	4	8%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.9 di atas menunjukkan bahwa 46% responden menyatakan biasa saja dengan etika tokoh calon pemimpin mempengaruhi hak pilih masyarakat pada pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram. Hal itu

karena etika bukan penilaian besar bagi masyarakat untuk menentukan pemimpin yang tepat untuk daerahnya, jika memiliki etika yang baik tetapi kinerja buruk masyarakat juga yang akan merasa dirugikan.

34% responden yang setuju juga mengeluarkan argumennya bahwa hal itu sangat berpengaruh karena jika etikanya tokoh tersebut tidak baik, bagaimana masyarakat bisa percaya dengan semua hasil kerjanya. Masyarakat akan merasa senang jika memiliki pemimpin yang memiliki etika yang baik untuk memimpin daerahnya. seperti halnya calon yang terpilih pada pilkada serentak tahun 2015 lalu yaitu Bapak Ahyar dan Bapak Mohan, bapak Walikota dan Wakil Walikota tersebut dekat dengan masyarakat yang ada di Kota Mataram, hal itu pula yang menjadi poin penting bagi masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut pada pilkada serentak tahun 2015 (wawancara, november 2017).

Dari 50 responden yang masuk dalam daftar penelitian penulis, ada 4% responden yang menyatakan bahwa kurang setuju atau tidak setuju sama sekali dengan etika tokoh calon pemimpin mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Hal itu didukung dengan keterangan bahwa etika calon pemimpin bisa saja menjadi cara calon tersebut dalam menarik masyarakat untuk dapat memilih calon tersebut, namun jika calon tersebut sudah terpilih sifat dan sikap asli calon pemimpin tersebut dapat terlihat. Masyarakat yang kurang setuju lebih memilih untuk menentukan calon pemimpin yang sesuai dengan hati nurani saja tanpa ada pemaksaan dari siapapun.

Setiap calon pemimpin memiliki banyak cara dan strategi masing masing untuk memperoleh kemenangan pada pilkada serentak. Bukan hanya etika tokoh yang menjadi tolak ukur minat masyarakat, namun visi-misi yang jelas pun jadi salah satu penilaian bagi masyarakat untuk membangun Kota Mataram kearah yang lebih baik. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pendapat masyarakat tentang visi-misi tokoh yang menjadi calon mempengaruhi masyarakat dalam memilih di Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	4	8%
2.	Setuju	29	58%
3.	Biasa saja	14	28%
4.	Kurang setuju	2	4%
5.	Tidak setuju sama sekali	1	2%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.10 di atas menunjukkan bahwa ada 58% responden menyatakan setuju dengan visi-misi mempengaruhi masyarakat dalam memilih pada pilkada serentak tahun 2015 lalu. Calon pemimpin yang

memiliki visi-misi merupakan pemimpin yang benar-benar memiliki keinginan untuk merubah daerahnya dan visi-misi calon pemimpin menjadi cover dari pasangan calon tersebut agar masyarakat dapat menilai se pantas apa pasangan calon tersebut untuk dapat dipilih oleh masyarakat. Masyarakat menilai bahwa dari visi-misi yang jelas, masyarakat dapat membayangkan bahwa jika benar visi-misi itu dapat menjadi pembaharu Kota Mataram maka menjadi kemungkinan besar masyarakat akan memilih calon tersebut (wawancara, november 2017).

Sebagai calon pemimpin daerah tokoh yang memiliki intelektual yang baik terlebih dalam bidang politik menjadi *point plus* bagi masyarakat untuk memilih calon tersebut. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.11

Pendapat masyarakat tentang tokoh yang menjadi calon adalah tokoh intelektual mempengaruhi masyarakat dalam memilih di Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	7	14%
2.	Setuju	28	56%
3.	Biasa saja	12	24%
4.	Kurang setuju	3	6%
5.	Tidak setuju sama sekali	0	0
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.11 di atas menunjukkan 56% responden setuju dengan calon pemimpin yang berintelektual dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih. Hal itu dikarenakan menjadi seorang pemimpin itu penting memiliki keserjanaan dan tingkat intelektual yang tinggi dalam memimpin daerah. Seorang calon pemimpin yang berilmu dan bersarjana lebih banyak memiliki pengalaman dan akan menjadi salah satu tolak ukur masyarakat dalam memilih pemimpin yang berintelektual. Dengan intelektual yang dimiliki calon pemimpin bisa berfikir kritis dalam menyelesaikan masalah yang ada dan mampu memberi perubahan positif untuk Kota Mataram.

24% responden dari tabel 3.11 di atas menyatakan bahwa masyarakat tersebut biasa saja dengan tokoh yang memiliki intelektual yang tinggi atau tidak, karena yang menjadi penilaian yaitu kinerjanya dalam pemerintahan jika terpilih. Intelektual memang diperlukan sebagai calon pemimpin, namun hal itu belum tentu menjamin apa yang masyarakat butuhkan dapat terpenuhi dan yang terpenting pemimpin tersebut harus memiliki sikap yang adil, kerja keras, dan berani untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi tokoh yang berintelektual atau tidak berintelektual bukan menjadi pengukuran penting dalam memilih calon pemimpin (wawancara, november 2017).

Sama halnya dengan 6% responden yang menyatakan kurang setuju karena menganggap bahwa pemimpin itu tidak diukur dari keintelektualannya saja, tapi dilihat dari bagaimana kinerjanya di

lapangan. Dari pernyataan berikutnya mengenai calon pemimpin yang tidak berintelektual penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.12

Pendapat masyarakat tentang tokoh yang menjadi calon bukan tokoh intelektual mempengaruhi masyarakat dalam memilih di Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	3	6%
2.	Setuju	4	8%
3.	Biasa saja	17	34%
4.	Kurang setuju	22	44%
5.	Tidak setuju sama sekali	4	8%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.12 di atas menunjukkan bahwa ada 44% menyatakan kurang setuju dengan tokoh calon pemimpin bukan merupakan tokoh intelektual. Hal itu disampaikan karena untuk menjalankan pemerintahan

yang baik harus memiliki intelektual yang baik pula. Calon pemimpin yang memiliki intelektual yang baik akan menjadi tolak ukur masyarakat untuk menerima pemimpin tersebut dalam membangun Kota Mataram. Jika seorang calon tidak memiliki intelektual yang baik, bagaimana masyarakat bisa yakin dan percaya bahwa calon pemimpin tersebut dapat menjalankan pemerintahan kota dengan baik.

Ada 34% responden dari tabel 3.12 di atas yang menyatakan biasa saja dengan calon pemimpin bukan tokoh yang memiliki intelektual yang tinggi. Hal tersebut didukung dengan pernyataan bahwa meskipun calon pemimpin bukan tokoh intelektual namun kerjanya baik dan dapat mengayomi masyarakat dirasa tidak menjadi masalah, dan walaupun calon tersebut memiliki intelektual yang baik itu akan lebih baik lagi karena masyarakat yakin bahwa yang memiliki intelektual tinggi memiliki wawasan yang lebih luas lagi. Namun berbeda dengan 4% responden dari tabel 3.12 di atas yang menyatakan bahwa mereka setuju dengan calon pemimpin bukan merupakan tokoh intelektual, karena pengalaman dari calon tersebutlah yang akan memberikan dampak baik dalam menjalankan tugasnya (wawancara, november 2017).

b) Partai politik

Untuk menarik *citizenship* masyarakat bukan hanya dilihat dari calon pemimpinnya saja namun ada juga dukungan dari partai. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.13

Pendapat masyarakat tentang keterlibatan masyarakat karena pengaruh partai masa yang sudah terkenal dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	0	0
2.	Setuju	14	28%
3.	Biasa saja	21	42%
4.	Kurang setuju	13	26%
5.	Tidak setuju sama sekali	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.13 di atas menunjukkan 42% responden menyatakan biasa saja dengan keterlibatan masyarakat karena pengaruh dari partai masa. Hal tersebut di dukung dengan alasan bahwa sudah beberapa kali partai politik yang ada di Kota Mataram melakukan sosialisasi dengan masyarakat, namun masyarakat menganggap hal itu hanya pengulangan saja tidak ada inovasi yang membuat masyarakat tertarik untuk hadir dalam acara tersebut. Dari banyaknya partai hanya ada segelintir partai yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat (wawancara, november 2017).

Hal yang menjadi pertanyaan penulis yaitu bagaimana dengan partai baru yang muncul apakah dapat mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam pilkada? dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.14

Pendapat masyarakat tentang keterlibatan masyarakat karena munculnya partai baru di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	0	0
2.	Setuju	6	12%
3.	Biasa saja	18	36%
4.	Kurang setuju	10	20%
5.	Tidak setuju sama sekali	6	12%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.14 di atas menunjukkan 36% responden menyatakan biasa saja dengan keterlibatan masyarakat karena munculnya partai baru pada pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram. Masyarakat menganggap tidak ada pengaruh besar dari partai baru karena dinilai belum memiliki peran besar dalam pilkada tahun 2015 lalu. Dari tabel 3.14 di atas juga dapat di lihat ada 20% responden menyatakan kurang setuju. Hasil wawancara dengan salah satu responden mengatakan bahwa permasalahan korupsi hingga saat ini makin banyak dan salah satunya oleh partai politik yang menciptakan kader yang berada di pemerintahan yang memiliki sedikit moral sehingga dengan senang memakan uang rakyat, apa lagi jika partai baru terus bertambah masyarakat akan hanya memakan tulang ayam (wawancara, november 2017).

Partai-partai besar yang ada di Indonesia saat ini sudah cukup memberikan dampak positif dan dampak negatif bagi pembangunan di

Kota Mataram khususnya. Partai politik juga merupakan pintu bagi masyarakat yang ingin mencalonkan dirinya untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah. Calon pemimpin yang di usung oleh berberapa partai politik tentunya membawa beberapa program dari partai tersebut. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pendapat masyarakat tentang keterlibatan masyarakat karena program partai yang mengusung mempengaruhi dalam memilih calon di Pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	1	2%
2.	Setuju	24	48%
3.	Biasa saja	19	38%
4.	Kurang setuju	4	8%
5.	Tidak setuju sama sekali	11	22%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Dari tabel 3.15 di atas menunjukkan bahwa ada 48% responden menyatakan setuju dengan keterlibatan masyarakat dalam memilih pada Pilkada serentak tahun 2015 karena program partai yang mengusung calon tersebut. Pernyataan tersebut didukung dengan keterangan

responden yang mengatakan bahwa alasan untuk setuju karena jika calon pemimpin tersebut terpilih menjadi Kepala Daerah pemimpin tersebut tetap harus berkerja sama dengan partai, karena itu program partai politik yang baik bisa menjadi salah satu keterlibatan masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram lalu.

Namun ada 38% responden yang menyatakan biasa saja dan ada 22% responden yang menyatakan tidak setuju sama sekali dengan keterlibatan masyarakat karena program partai yang mengung mengaruhi masyarakat dalam memilih di pilkada serentak tahun 2015 lalu. Menurut salah satu responden yang menyatakan biasa saja, karena mereka memilih pemimpin yang memang sesuai dengan hati nurani bukan dari partai politik sekalipun. Sedangkan menurut responden yang menyatakan tidak setuju sama sekali, hal itu karena sudah rendahnya kepercayaan masyarakat kepada partai politik dan KPUD. Masyarakat merasa percuma memiliki program yang sangat bagus tapi untuk direalisasikan (wawancara, november 2017).

Keterlibatan masyarakat juga dapat dilihat pengaruh dari kader partai yang mengajak masyarakat untuk datang ke TPS untuk memilih, walaupun hal itu sering dikaitkan dengan mengajak masyarakat untuk memilih calon yang diusung dari partai tersebut. Dari hasil penelitian penulis memperoleh data sebagai berikut:

Tabel 3.16
Pendapat masyarakat tentang pengaruh dari kader partai mempengaruhi dalam memilih calon di pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram.

No.	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase (%)
1.	Sangat setuju	0	0
2.	Setuju	15	30%
3.	Biasa saja	22	44%
4.	Kurang setuju	11	22%
5.	Tidak setuju sama sekali	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2017

Tabel 3.16 tersebut di atas menunjukkan 44% responden menyatakan biasa saja dengan aktifitas kader untuk mempengaruhi masyarakat dalam keterlibatannya dalam pilkada serentak tahun 2015 lalu. Hal itu karena masyarakat tersebut merasa bahwa setiap diadakannya pemilu kader-kader partai pasti melakukan hal tersebut, membuat masyarakat sudah menjadi terbiasa.

Lain halnya dengan 30% reponden yang menyatakan setuju dan 22% responden yang menyatakan kurang setuju. Masyarakat yang setuju dengan perilaku kader yang mempengaruhi masyarakat menjelang pilkada karena dari kader-kader partai tersebut masyarakat bisa mengetahui bagaimana calon pemimpin yang akan di pilih dan kinerja dari anggota partai tersebut membuat masyarakat berfikir bahwa calon pemimpin dari partai tersebut memiliki niat yang baik untuk menjadi Kepala Daerah, tinggal masyarakatnya saja yang menentukan apakah ingin memilih atau tidak memilih, sedangkan masyarakat yang

menyatakan kurang setuju karena masyarakat ingin memilih sesuai dengan hati nurani tanpa ada campur tangan dari pihak manapun (wawancara, 2017).

B. Pembahasan

Berdasarkan analisis data kuesioner di atas, *citizenship* masyarakat Kota Mataram sudah menjadi perhatian pada waktu terakhir ini. Permasalahan *citizenship* masyarakat Kota Mataram sudah mendapat perubahan. Dari hasil data kuesioner memperlihatkan bahwa hasil jawaban dari responden banyak merujuk kepada *citizenship* yang mereka miliki. Kota Mataram merupakan ibu kota sekaligus pusat pemerintahan yang tidak menutup kemungkinan jika masyarakat Kota Mataram paham akan *citizenship*.

Namun hal itu menjadi momok menakutkan pada penelitian di lapangan, ada masyarakat yang menyatakan bahwa dirinya sudah tidak memperdulikan lagi dengan perpolitikan di Indonesia. Perpolitikan di Indonesia dari Pusat hingga daerah terkecil pun dirasa sudah memiliki perjanjian dimana ketika ada satu orang yang bermain dalam pemerintahan tersebut, semuanya akan ikut bermain. Yang terjadi di Kota Mataram pun telah ia rasakan dimana ada calon pemimpin daerah yang melakukan transaksi tersembunyi kepada KPU untuk dapat perubah surat suara yang ada. Hal tersebut menjadi keyakinan tersendiri dengan kenyataan bahwa pemerintahan di Indonesia semuanya hanya drama yang di permainkan oleh tokoh-tokoh penting didalamnya.

Dari satu permasalahan yang penulis dapatkan saat berada dilokasi penelitian tersebut merasa bahwa *citizenship* masyarakat tidak dapat di bentuk

hanya dari diri sendiri dalam membangun *citizenship* masyarakat. Namun pengaruh dari berbagai elemen bisa menjadi pengaruh *citizenship* masyarakat.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat *Citizenship* Masyarakat Dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 Di Kota Mataram

Citizenship adalah suatu praktik atau tindakan yang mencakup beberapa komponen yang meliputi politik, ekonomi, yudisial dan budaya. Masuk dalam ranah pilkada, *citizenship* masuk dalam komponen politik dimana masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk bebas ikut berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat *citizenship* masyarakat dalam pilkada serentak tahun 2015 di Kota Mataram adalah sebagai berikut:

a. Faktor KPU

Faktor Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan faktor yang memiliki peranan langsung dalam pilkada di Kota Mataram. Pengaruh dari KPU sangat memberikan pengaruh yang besar terlebih kepada para pemilih pemula di Kota Mataram.

Peran KPU dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bisa meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput. Bahkan dalam rekapitulasi KPU Kota Mataram angka golput sangat tinggi dibandingkan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, prosentase golput yang relatif

besar yaitu 44,26% dari total jumlah pemilih. Walaupun golput juga bagian dari pilihan demokratis yaitu pilihan antara memilih dan tidak memilih, tetapi sikap golput berpotensi memandulkan pemilu sebagai ajang penjangkaran aspirasi masyarakat.

KPU Kota Mataram telah memberikan Bimbingan Teknis Tata Cara Pelaksanaan “PILKETOS” Pemilihan Ketua Osis di SMK Negeri 6 Mataram. Dari sini pagi para pemilih pemula dapat belajar dan memahami tata cara pemilu dan bagaimana melakukan pemilihan dengan benar.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kota Mataram Bapak Khalid juga mengatakan (dalam AntaraNTB.com, 2015) Pemerintah Kota Mataram bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram sudah melakukan sosialisasi terutama untuk pemilih pemula yang tercatat ada sekitar 4000 orang dalam menekat angka golput di Kota Mataram pada pilkada serentak 2015 lalu, yang menjadi ketakutan bahwa pemilih pemula memilih golput atau tidak menyalurkan hak demokrasinya jika tidak diberikan pemahaman akan pentingnya sebagai warganegara yang memiliki hak dan kewajiban. Pemilih pemula rentan menjadi golput karena cenderung suka ikut-ikutan dan cepat terpengaruh dengan ajakan dari teman sebayanya.

b. Faktor Partai Politik

kandidat-kandidat dalam Pemilu dapat dilihat dari kualitas calon yang dipilih harus benar-benar memiliki kemampuan intelektual yang baik

1. Fungsi sarana rekrutmen politik

Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) menyiapkan kader-kader pemimpin politik; (2) selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) perjuangan untuk menempatkan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan- jabatan politik yang bersifat strategis. Makin besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam tiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

Rekrutmen politik yang adil, transparan, dan demokratis pada dasarnya adalah untuk memilih orang-orang yang berkualitas dan mampu memperjuangkan nasib rakyat banyak untuk mensejahterakan dan menjamin kenyamanan dan keamanan hidup bagi setiap warga negara. Kesalahan dalam memilih kader yang duduk dalam jabatan strategis bisa menjauhkan arah perjuangan dari cita rasa kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi

masyarakat luas. Oleh karena itulah tidaklah berlebihan bilaman dikatakan bahwa rekrutmen politik mengandung implikasi pada pembentukan cara berpikir, bertindak dan berperilaku setiap warga negara yang taat, patuh terhadap hak dan kewajiban, namun penuh dengan suasana demokrasi dan keterbukaan bertanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Fungsi dalam sarana sosialisasi dan pendidikan politik

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet. Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik

pada takaran yang maksimal. Dalam hal ini setidaknya ada tiga hal utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik tidak memiliki peluang besar dalam membangun citizenship masyarakat.

Pertama, dalam masyarakat anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpaku kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik.

c. Faktor Keluarga

Faktor keluarga adalah salah satu faktor yang paling utama dalam meningkatkan *citizenship* seseorang. *Citizenship* yang tercipta dari keluarga biasanya lebih sangat mempengaruhi setiap individu. Dari yang penulis dapat di lapangan, masyarakat Kota Mataram pada pilkada serentak tahun 2015 yang banyak mempengaruhi yaitu dari keluarga mereka sendiri, entah itu orang tua maupun keluarga. Masyarakat Kota Mataram yang memiliki anak sudah memenuhi syarat dalam pilkada faktor dari keluarga dapat mempengaruhi hingga pilihan yang di pilih.

d. Faktor Diri Sendiri

Setiap individu memiliki kesadaran akan *citizenship* yang dimilikinya masing-masing. *Citizenship* yang sudah terbangun dari diri sendiri akan lebih mudah dalam menentukan hak dan kewajiban itu sendiri dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di Kota Mataram, masyarakat menyadari akan *citizenship* yang sudah dirasakan namun tidak dapat mengaplikasikannya dalam bentuk nyata.

2. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Meningkatkan *Citizenship* Masyarakat Kota Mataram.

a. Faktor Pendukung

1. Masyarakat bersemangat dalam menerima setiap kegiatan yang di berikan dari KPU Kota Mataram.

KPU Kota Mataram telah melakukan kegiatan dalam mensosialisasikan pentingnya mengikuti setiap proses kegiatan pada pilkada serentak tahun 2015 terutama pada pemilih pemula. Masyarakat Kota Mataram menyambut setiap kegiatan dari KPU dalam sosialisasinya mendapat partisipasi yang cukup baik dari masyarakat, terlebih masyarakat Kota Mataram memiliki pemukiman yang berdekatan sehingga setiap kegiatan

sosialisasi ini menjadi tempat berkumpul bagi masyarakat di Kota Mataram (wawancara, november 2017).

Pemilih pemula terutama merasa dengan adanya kegiatan sosialisasi kegiatan dari KPU menjadi penambah wawasan bagi generasi muda yang suaranya sudah mampu mempengaruhi dalam pemilihan umum. Dengan kegiatan tersebut para pemilih pemula berharap bahwa sosialisasi mengenai pemilihan umum ini dapat terus dijalankan tidak hanya saat menjelang pemungutan suara saja (wawancara, november 2017).

2. Masyarakat butuh calon peserta pilkada yang mampu melindungi masyarakat tertindas.

Dari setiap kegiatan yang dilakukan partai politik maupun KPU sudah menjadi kewajiban untuk dapat menjembatani aspirasi masyarakat dapat tersampaikan. Hal ini menjadi bukan hanya dalam pelaksanaannya saja namun juga dalam seleksi calon pemimpin daerah. Masyarakat Kota Mataram membutuhkan pemimpin daerah yang mampu melindungi hak dan kewajibannya tidak menutup kemungkinan masyarakat minoritas di Kota Mataram.

b. Faktor Penghambat

1. Masyarakat masih tidak dapat meninggalkan pekerjaan mereka pada saat pilkada serentak tahun 2015.

Dari hasil wawancara, masyarakat Kota Mataram banyak yang merasakan bahwa pekerjaan mereka lebih mempengaruhi kehidupannya tanpa harus memilih siapa yang menjadi pemimpin daerahnya. Hal ini sangat disayangkan terlebih jika tidak adanya faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam meningkatkan *citizenship* yang sudah dimilikinya sebagai warga negara.

2. Kurangnya pemahaman dalam diri masyarakat tentang *citizenship* karena kurangnya sosialisasi dari yang bersangkutan.

Hal ini menjadi faktor penghambat karena masyarakat Kota Mataram hanya memahami bahwa kebiasaan yang sudah ada dalam Pilkada sangat penting seperti halnya datang ke-TPS untuk memilih, memilih sesuai hati nurani dan sebagainya. Namun dalam hal memahami bahwa sebagai warga negara kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan dapat dipahami. Tanpa bantuan dari pemerintah, KPU sebagai penyelenggara, Partai Politik dan peran-peran dari berbagai aspek lainnya, masyarakat Kota Mataram tidak akan memiliki peningkatan dalam memahami *citizenship*.